

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan pada abad ke-21 menuntut adanya perubahan paradigma dalam proses belajar mengajar. Peserta didik tidak cukup hanya menguasai pengetahuan akademis, melainkan juga dituntut memiliki keterampilan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, kreativitas, serta kolaborasi. Salah satu keterampilan mendasar yang menopang pencapaian keterampilan tersebut adalah literasi. Dalam hal ini, literasi kebahasaan memegang peranan penting karena menjadi fondasi utama dalam memahami pengetahuan, mengolah informasi, dan menyampaikan gagasan. Literasi kebahasaan bukan hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis secara teknis, melainkan juga mencakup keterampilan menafsirkan makna, menganalisis teks, mengkritisi informasi, serta menghasilkan gagasan lisan maupun tulisan dalam konteks yang bermakna (Lestari et al., 2021).

Kesadaran akan pentingnya literasi kebahasaan mendorong pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis. Salah satu kebijakan utama adalah Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang lahir dari Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Program GLS dirancang dalam tiga tahap, yaitu pembiasaan membaca, pengembangan keterampilan literasi, serta pembelajaran literasi yang terintegrasi dengan kurikulum. Tujuan utamanya adalah membangun budaya literasi di sekolah agar peserta didik terbiasa membaca, menulis, serta berpikir kritis sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari (Antoro, 2017).

Sejalan dengan penguatan program literasi nasional, pemerintah juga mengembangkan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif sebagai instrumen standar untuk mengukur kompetensi berbahasa warga negara. UKBI berfungsi untuk menilai keterampilan menyimak, membaca,

menulis, dan berbicara secara terstruktur dan terstandar. Hasil UKBI tidak hanya berperan dalam memetakan kemampuan berbahasa siswa, tetapi juga menjadi dasar refleksi guru dalam memperbaiki praktik pembelajaran bahasa agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan perkembangan literasi kebahasaan (Badan Bahasa, 2022).

Meskipun kebijakan literasi telah dikembangkan secara nasional, capaian literasi siswa Indonesia masih menunjukkan berbagai tantangan. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada posisi rendah dalam literasi membaca. PISA 2018 menempatkan Indonesia di peringkat 71 dari 77 negara dengan skor 371 (OECD, 2019). Laporan terbaru PISA 2022 bahkan menunjukkan skor Indonesia menurun menjadi 359 dan berada di bawah rata-rata OECD sebesar 476 (OECD, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan literasi belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan implementasi program literasi di lingkungan sekolah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan literasi yang telah dirumuskan secara nasional belum secara otomatis menjamin tercapainya peningkatan kemampuan literasi peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi implementasi kebijakan literasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan mampu diterjemahkan ke dalam praktik pendidikan di tingkat sekolah, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Penelitian Yusuf dan Jufri (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan monitoring, keterlibatan orang tua, serta keterbatasan sarana pendukung literasi. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga membawa perubahan terhadap pola belajar peserta didik. Siswa saat ini cenderung lebih dekat dengan media visual dan informasi instan melalui telepon genggam maupun media sosial dibandingkan aktivitas membaca secara mendalam. Situasi tersebut menyebabkan tantangan literasi di

sekolah tidak lagi hanya berkaitan dengan rendahnya aktivitas membaca, tetapi juga berkaitan dengan perubahan pola konsumsi informasi peserta didik di era digital.

Berbagai penelitian mengenai implementasi kebijakan literasi pada umumnya berfokus pada pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah, efektivitas program literasi, maupun berbagai kendala yang dihadapi sekolah dalam mengembangkan budaya literasi. Temuan-temuan tersebut memberikan gambaran mengenai faktor penghambat implementasi kebijakan literasi, namun sebagian besar masih berorientasi pada identifikasi pelaksanaan program dan belum menjelaskan secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan suatu sekolah mampu mengimplementasikan kebijakan literasi secara konsisten hingga menghasilkan budaya literasi yang unggul. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) mengenai bagaimana implementasi kebijakan literasi dapat menghasilkan budaya literasi yang berkelanjutan, khususnya pada sekolah yang tidak berstatus sebagai sekolah favorit.

Perubahan pola belajar tersebut menyebabkan sekolah tidak cukup hanya menghadirkan program pembiasaan membaca, tetapi juga perlu membangun budaya literasi yang mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik belajar peserta didik saat ini. Literasi di sekolah tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai aktivitas membaca buku, melainkan perlu diarahkan pada kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, mengolah gagasan, serta memanfaatkan media digital secara bijak. Dengan demikian, implementasi kebijakan literasi di sekolah memerlukan dukungan program, sumber daya, dan strategi pembelajaran yang mampu membangun keterlibatan siswa secara lebih aktif dan berkelanjutan.

Salah satu fenomena yang menunjukkan kondisi berbeda dari kecenderungan tersebut terdapat di SMP Negeri 1 Padamara, Kabupaten Purbalingga. Meskipun bukan merupakan sekolah favorit, sekolah ini berhasil meraih penghargaan UKBI terbaik selama tiga tahun berturut-turut serta ditetapkan sebagai sekolah acuan pengembangan literasi bagi wilayah Purbalingga, Purwokerto, dan Banjarnegara. Fenomena ini menunjukkan

bahwa keberhasilan implementasi kebijakan literasi tidak selalu ditentukan oleh status sekolah sebagai sekolah unggulan, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut sebagai kasus yang mampu memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan literasi di tingkat sekolah.

Dalam konteks lokal, SMP Negeri 1 Padamara di Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu sekolah yang menunjukkan perhatian terhadap pengembangan program literasi kebahasaan. Berdasarkan hasil grand tour Dinas Pendidikan, sekolah ini dinilai memiliki program literasi yang cukup berkembang dibandingkan sekolah lain di wilayah sekitarnya dan menjadi salah satu sekolah yang dijadikan acuan dalam pengembangan program literasi. Hasil grand tour dan observasi awal peneliti menunjukkan bahwa sekolah telah melaksanakan berbagai kegiatan literasi melalui Gerakan Literasi dan Numerasi Sekolah (GLNS), pembiasaan membaca rutin, integrasi literasi dalam pembelajaran, kegiatan jurnalistik sekolah, serta beberapa program literasi berbasis digital. Selain itu, sekolah juga telah membentuk Tim Gerakan Literasi Sekolah (GLS), menyediakan perpustakaan, pojok baca, serta berbagai fasilitas pendukung kegiatan literasi lainnya sebagai upaya membangun budaya literasi di lingkungan sekolah.

Meskipun berbagai program literasi telah dikembangkan dan dilaksanakan, efektivitas implementasinya belum dapat dinilai hanya dari keberadaan program dan fasilitas yang tersedia. Belum banyak penelitian yang mengevaluasi secara komprehensif keterkaitan antara konteks kebijakan, kesiapan sumber daya, proses implementasi, dan hasil pelaksanaan kebijakan dalam menjelaskan keberhasilan sekolah non-favorit yang mampu membangun budaya literasi secara konsisten. Belum diketahui secara mendalam sejauh mana program-program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan, bagaimana kesiapan sumber daya yang mendukung pelaksanaannya, serta bagaimana dampaknya terhadap penguatan budaya literasi peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif agar keberhasilan implementasi

kebijakan maupun aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan dapat diidentifikasi secara lebih objektif dan sistematis.

Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya melaksanakan kebijakan literasi sebagai kegiatan administratif, tetapi juga berupaya mengembangkan budaya literasi melalui berbagai aktivitas pembelajaran dan kegiatan sekolah. Kondisi tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena implementasi kebijakan literasi kebahasaan di sekolah tidak hanya berkaitan dengan keberadaan program, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dalam praktik pembelajaran, didukung oleh sumber daya sekolah, serta diintegrasikan ke dalam budaya belajar peserta didik. Selain itu, evaluasi implementasi kebijakan literasi kebahasaan menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara tujuan kebijakan, pelaksanaan program di tingkat sekolah, dan hasil yang dihasilkan bagi peserta didik, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan dan program literasi pada masa mendatang.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi kebijakan literasi kebahasaan di SMP Negeri 1 Padamara menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran mengenai konteks pelaksanaan kebijakan, kesiapan sumber daya, proses implementasi program, serta dampak pelaksanaan kebijakan terhadap penguatan budaya literasi di sekolah. Penelitian ini dilakukan menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) agar evaluasi dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap implementasi kebijakan literasi kebahasaan di SMP Negeri 1 Padamara. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi sekolah maupun pemangku kebijakan dalam mengembangkan program literasi kebahasaan yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di era digital.

B. Fokus dan Sub fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka fokus dalam penelitian ini adalah mengevaluasi implementasi kebijakan literasi

kebahasaan di SMP Negeri 1 Padamara, Kabupaten Purbalingga, menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product).

Untuk memperjelas arah kajian penelitian, fokus tersebut dijabarkan ke dalam beberapa subfokus sebagai berikut:

1. Context: Mengevaluasi kesesuaian kebutuhan, tujuan, dan relevansi implementasi kebijakan literasi kebahasaan dengan kondisi serta kebutuhan SMP Negeri 1 Padamara dalam mendukung pengembangan budaya literasi di sekolah.
2. Input: Mengevaluasi kesiapan sumber daya dalam mendukung implementasi kebijakan literasi kebahasaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dukungan kebijakan sekolah, fasilitas pendukung kegiatan literasi, serta dukungan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan program literasi.
3. Process: Mengevaluasi pelaksanaan implementasi kebijakan literasi kebahasaan yang meliputi pembiasaan literasi, integrasi literasi dalam proses pembelajaran, pelaksanaan berbagai kegiatan literasi di sekolah, serta monitoring dan evaluasi program untuk menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan tujuan kebijakan.
4. Product: Mengevaluasi hasil implementasi kebijakan literasi kebahasaan terhadap penguatan budaya literasi dan perkembangan kemampuan literasi peserta didik sebagai indikator ketercapaian tujuan kebijakan di SMP Negeri 1 Padamara.

Intelligentia - Dignitas

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian yang telah dipaparkan, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil evaluasi aspek Context dalam implementasi kebijakan literasi kebahasaan di SMP Negeri 1 Padamara yang meliputi kesesuaian kebutuhan, tujuan, dan relevansi kebijakan terhadap pengembangan budaya literasi di sekolah?
2. Bagaimana hasil evaluasi aspek Input dalam implementasi kebijakan literasi kebahasaan di SMP Negeri 1 Padamara yang meliputi kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dukungan kebijakan sekolah, serta fasilitas pendukung kegiatan literasi?
3. Bagaimana hasil evaluasi aspek Process dalam implementasi kebijakan literasi kebahasaan di SMP Negeri 1 Padamara yang meliputi pelaksanaan pembiasaan literasi, integrasi literasi dalam pembelajaran, pelaksanaan berbagai kegiatan literasi, serta monitoring dan evaluasi program literasi?
4. Bagaimana hasil evaluasi aspek Product dalam implementasi kebijakan literasi kebahasaan di SMP Negeri 1 Padamara terhadap penguatan budaya literasi dan perkembangan kemampuan literasi peserta didik?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi aspek Context dalam implementasi kebijakan literasi kebahasaan di SMP Negeri 1 Padamara yang meliputi kesesuaian kebutuhan, tujuan, dan relevansi kebijakan terhadap pengembangan budaya literasi di sekolah.
2. Mengevaluasi aspek Input dalam implementasi kebijakan literasi kebahasaan di SMP Negeri 1 Padamara yang meliputi kesiapan

sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dukungan kebijakan sekolah, serta fasilitas pendukung kegiatan literasi.

3. Mengevaluasi aspek Process dalam implementasi kebijakan literasi kebahasaan di SMP Negeri 1 Padamara yang meliputi pelaksanaan pembiasaan literasi, integrasi literasi dalam pembelajaran, pelaksanaan berbagai kegiatan literasi, serta monitoring dan evaluasi program literasi.
4. Mengevaluasi aspek Product dalam implementasi kebijakan literasi kebahasaan di SMP Negeri 1 Padamara terhadap penguatan budaya literasi dan perkembangan kemampuan literasi peserta didik.
5. Merumuskan rekomendasi penguatan implementasi kebijakan literasi kebahasaan berdasarkan hasil evaluasi Model CIPP sebagai masukan bagi sekolah dan pemangku kebijakan dalam mengembangkan budaya literasi yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai evaluasi kebijakan literasi kebahasaan di SMP Negeri 1 Padamara ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu manajemen pendidikan, khususnya dalam bidang evaluasi kebijakan pendidikan. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur mengenai kebijakan literasi kebahasaan di tingkat sekolah menengah pertama, serta memperkuat referensi tentang penerapan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dalam menilai program pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa pada konteks dan jenjang pendidikan yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kebijakan literasi kebahasaan, sehingga sekolah dapat melakukan perbaikan dan pengembangan program literasi sesuai kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.
- b. Memberikan umpan balik tentang strategi pembelajaran berbasis literasi, terutama dalam pemanfaatan literasi digital dan pelaksanaan UKBI Adaptif, sehingga guru dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan inovasi dalam mengintegrasikan literasi ke dalam pembelajaran.
- c. Mendorong terbentuknya budaya literasi yang lebih kuat melalui pengembangan keterampilan mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara. Dengan demikian, siswa dapat memiliki kompetensi literasi yang memadai untuk mendukung keberhasilan akademik maupun menghadapi tantangan di masa depan.
- d. Menjadi masukan dalam perumusan dan penguatan kebijakan literasi di tingkat daerah, khususnya dalam penyusunan program-program literasi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan era digital.
- e. Menjadi referensi dan inspirasi bagi penelitian sejenis, baik dalam lingkup literasi kebahasaan, evaluasi kebijakan pendidikan, maupun penggunaan model evaluasi CIPP dalam konteks pendidikan.
- f. Memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga dalam merumuskan kebijakan literasi kebahasaan yang lebih efektif dan kontekstual di tingkat daerah.

F. Kebaruan Penelitian (*State of the Art*)

Penelitian mengenai implementasi kebijakan literasi telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir seiring meningkatnya perhatian terhadap penguatan budaya literasi sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Berbagai penelitian telah

mengkaji implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS), implementasi kebijakan pendidikan, pengembangan budaya literasi, hingga faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan literasi pada berbagai jenjang pendidikan. Perkembangan kajian tersebut menunjukkan bahwa literasi tidak lagi dipandang hanya sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari kebijakan strategis yang berperan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, kompetensi peserta didik, serta mutu penyelenggaraan pendidikan. Temuan-temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan literasi dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari kejelasan kebijakan, kesiapan sumber daya, kualitas pelaksanaan program, hingga mekanisme evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Hasil telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya keragaman fokus kajian, pendekatan penelitian, model evaluasi, serta objek penelitian yang digunakan. Sebagian penelitian berfokus pada implementasi Gerakan Literasi Sekolah sebagai program penguatan budaya literasi, sementara penelitian lainnya mengkaji evaluasi kebijakan pendidikan, faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan literasi peserta didik, maupun strategi pengembangan literasi dalam proses pembelajaran. Keragaman tersebut memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan literasi merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi dalam konteks penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, telaah terhadap penelitian terdahulu diperlukan untuk memetakan perkembangan penelitian, mengidentifikasi kecenderungan temuan, membandingkan pendekatan yang telah digunakan, serta memberikan landasan akademik bagi penyusunan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menelaah dua puluh penelitian terdahulu yang dipilih berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu evaluasi implementasi kebijakan literasi kebahasaan. Pemilihan penelitian didasarkan pada kesesuaian tema, model evaluasi, pendekatan penelitian, objek kajian, serta kontribusinya terhadap pengembangan kajian

manajemen pendidikan. Ringkasan penelitian terdahulu tersebut disajikan pada Tabel 1.1.

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Penelitian	Kesenjangan Penelitian
1	Anita Cahyani, St. Y. Slamet, & Sudiyanto (2025)	A Systematic Literature Review of School Literacy Movement Policies: Hope and Reality	Systematic Literature Review	Literature Review Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) memberikan dampak positif terhadap peningkatan hasil belajar, motivasi belajar, dan budaya literasi siswa. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dukungan sekolah, guru, keluarga, dan evaluasi yang berkelanjutan.	Penelitian merangkum berbagai hasil penelitian, tetapi belum mengevaluasi implementasi kebijakan literasi kebahasaan pada satuan pendidikan tertentu.
2	Elhakim (2024)	Participatory Evaluation in Education Policy: Collaborative Approaches to	Kualitatif	Evaluasi partisipatif mendorong peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi	Belum mengkaji implementasi kebijakan literasi pada tingkat satuan pendidikan sehingga belum

		Monitoring and Assessment		kebijakan melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.	memberikan gambaran spesifik mengenai kebijakan literasi sekolah.
3	Whitsel et al. (2024)	Frameworks for Evaluating Educational Policy Implementation and Outcomes	Kualitatif	Penelitian menawarkan kerangka evaluasi implementasi kebijakan yang mengintegrasikan evaluasi proses dan hasil sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.	Kerangka evaluasi masih bersifat umum dan belum diterapkan pada evaluasi implementasi kebijakan literasi di sekolah.
4	Hidayah & Widodo (2022)	Creating a Print-Rich Environment to Support School Literacy Movement	Kualitatif	Lingkungan kaya teks berperan dalam membangun budaya literasi sekolah melalui penyediaan berbagai media baca dan	Penelitian hanya menyoroti lingkungan literasi sehingga belum mengevaluasi implementasi kebijakan

				dukungan lingkungan belajar yang kondusif.	literasi secara menyeluruh.
5	Dwi Ika (2024)	National Policy on the School Literacy Movement: What Is Missing?	Kualitatif	Implementasi kebijakan GLS masih menghadapi kesenjangan antara kebijakan nasional dengan pelaksanaan di sekolah akibat lemahnya strategi operasional dan sistem evaluasi.	Belum mengevaluasi implementasi kebijakan pada konteks sekolah tertentu sehingga belum diketahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.
6	Kokom Komariah et al. (2023)	The Implementation of Post-Covid-19 Pandemic School Literacy in Senior High Schools	Kualitatif	Program literasi tetap berjalan setelah pandemi, namun implementasinya masih didominasi kegiatan pembiasaan dan belum terintegrasi secara optimal dalam proses pembelajaran.	Penelitian dilakukan pada jenjang SMA sehingga belum menggambarkan implementasi kebijakan literasi pada jenjang SMP.

7	Habibi et al. (2025)	The Effect of School Literacy Policy, Literacy Programs, and Literacy Instruction on School Literacy Culture	Kuantitatif	Kebijakan literasi, program literasi, dan pembelajaran literasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap terbentuknya budaya literasi sekolah.	Penelitian menguji hubungan antarvariabel, namun belum menjelaskan proses implementasi kebijakan literasi secara mendalam.
8	Ilza Mayuni et al. (2020)	School Literacy Movement and Its Implications Towards Students' Learning	Mixed Methods	Implementasi literasi di Taiwan menunjukkan hasil yang lebih optimal dibandingkan Indonesia karena didukung kebijakan yang konsisten, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, dan integrasi literasi dalam pembelajaran.	Penelitian membandingkan implementasi literasi antarnegara, namun belum mengevaluasi implementasi kebijakan literasi kebahasaan pada satuan pendidikan secara spesifik.
9	Meri, Sofyan, &	Evaluation of the School Literacy	Kualitatif	Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah telah	Penelitian dilakukan pada jenjang sekolah

	Yanto (2023)	Movement in Primary Schools		berjalan dengan baik, tetapi masih ditemukan kelemahan pada aspek penyediaan sumber daya dan pelaksanaan program yang memerlukan perbaikan	dasar sehingga belum menggambarkan implementasi kebijakan literasi pada jenjang sekolah menengah pertama.
10	Dulhamin Napitupulu & Mulyanto (2023)	Evaluasi Implementasi Program Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar	Kualitatif	Implementasi GLS menunjukkan capaian yang sangat baik pada aspek konteks dan baik pada aspek input. Namun, pelaksanaan program masih terkendala rendahnya minat literasi siswa, keterbatasan sarana perpustakaan, dan belum tersedianya tenaga	Penelitian berfokus pada evaluasi implementasi GLS di sekolah dasar sehingga belum memberikan gambaran implementasi kebijakan literasi kebahasaan pada jenjang SMP.

				pustakawan yang sesuai.	
11	Rizky Dwi Nugrahaeni & Cicih Wiarsih (2023)	Problematics and Implementation of the Literacy Movement	Kualitatif	Implementasi Gerakan Literasi Sekolah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, koordinasi antarwarga sekolah, dan dukungan masyarakat.	Penelitian lebih menitikberatkan pada identifikasi kendala implementasi dan belum mengevaluasi implementasi kebijakan secara komprehensif.
12	Kunto Nurcahyoko et al. (2024)	Investigating the Factors Influencing Literacy Skills among Young Students in Rural Areas	Mixed Methods	Kemampuan literasi siswa dipengaruhi oleh motivasi belajar, keterlibatan orang tua, lingkungan belajar, serta ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai.	Penelitian berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan literasi siswa, bukan pada evaluasi implementasi kebijakan literasi.
13	Evi Fatimatur	Literacy Policy in Southeast Asia	Kualitatif	Kebijakan literasi di negara-negara Asia	Penelitian mengkaji kebijakan pada

	Rusydiyah et al. (2023)			Tenggara menunjukkan keberhasilan yang dipengaruhi oleh komitmen pemerintah, dukungan pemangku kepentingan, serta karakteristik sistem pendidikan masing-masing negara.	tingkat regional sehingga belum menjelaskan implementasi kebijakan literasi pada tingkat satuan pendidikan.
14	L. Hasan Ashari, Arif Hidayad, & Lalu Heri (2024)	Evaluasi Implementasi GLS Sekolah Dasar di Kabupaten Bima: Model CIPP	Kualitatif	Implementasi Gerakan Literasi Sekolah berjalan cukup efektif, namun beberapa indikator, terutama monitoring dan partisipasi warga sekolah, masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan program lebih optimal.	Penelitian terbatas pada implementasi GLS di sekolah dasar sehingga belum memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan literasi kebahasaan pada jenjang SMP.

15	Yusuf & Wahab Jufri (2023)	Evaluasi Pelaksanaan Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SMPN 17 Mataram	Kualitatif	Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah telah sesuai dengan landasan hukum dan berjalan dengan baik. Program ini mampu meningkatkan minat baca, membentuk perilaku membaca, serta memberikan dampak positif terhadap prestasi belajar siswa.	Penelitian terbatas pada evaluasi pelaksanaan program di satu sekolah sehingga belum memberikan gambaran implementasi kebijakan literasi kebahasaan pada konteks sekolah yang berbeda.
16	Ruth Mariska Sihombing & Liesna Andriany (2025)	Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri untuk Meningkatkan Literasi Siswa dalam Menganalisis Teks Biografi	Kualitatif	Penerapan model pembelajaran inkuiri meningkatkan hasil belajar siswa, aktivitas pembelajaran, serta kemampuan menganalisis unsur kebahasaan dalam teks biografi.	Penelitian berfokus pada efektivitas model pembelajaran sehingga belum mengkaji implementasi kebijakan literasi dalam perspektif manajemen pendidikan.

17	Layli Hidayah & Ganjar Setyo Widodo (2020)	Evaluasi Lingkungan Kaya Teks dalam Program GLS	Kualitatif	Lingkungan kaya teks di sekolah belum berkembang secara optimal karena belum didukung mekanisme evaluasi yang berkelanjutan serta penyediaan sarana literasi visual-teks yang konsisten.	Kajian difokuskan pada evaluasi lingkungan kaya teks sebagai salah satu komponen GLS, sehingga belum mengevaluasi implementasi kebijakan literasi secara komprehensif.
18	Lela Komalasari & Lina Hadisah (2022)	Program Pembelajaran Literasi Multibahasa melalui PTK	Kualitatif	Program literasi multibahasa meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Setiap siklus menunjukkan adanya perbaikan melalui refleksi guru dan kepala sekolah terhadap strategi pembelajaran yang diterapkan.	Penelitian berorientasi pada pengembangan strategi pembelajaran sehingga belum membahas implementasi kebijakan literasi kebahasaan pada tingkat satuan pendidikan.
19	Kartikasari &	Implementasi Gerakan	Kualitatif	Implementasi Gerakan Literasi	Kajian berfokus pada

	Nuryasana (2023)	Literasi Sekolah		Sekolah dilaksanakan melalui tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dukungan kepala sekolah, guru, peserta didik, serta ketersediaan sarana pendukung.	pelaksanaan program GLS sehingga belum mengevaluasi implementasi kebijakan literasi kebahasaan menggunakan pendekatan evaluasi yang komprehensif.
20	Ilza Mayuni et al. (2020)	School Literacy Movement and Its Implications Towards Students' Learning	Mixed Methods	Perbandingan implementasi literasi menunjukkan bahwa keberhasilan sekolah di Taiwan didukung oleh kebijakan yang konsisten, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan integrasi literasi	Penelitian memberikan perspektif komparatif antarnegara, namun belum mengkaji implementasi kebijakan literasi kebahasaan secara mendalam pada satu sekolah

				dalam proses pembelajaran.	sebagai objek evaluasi.
--	--	--	--	----------------------------	-------------------------

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil telaah terhadap dua puluh penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa kajian mengenai literasi telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan tersebut tidak hanya ditunjukkan oleh semakin beragamnya objek penelitian, tetapi juga oleh meluasnya fokus kajian mulai dari implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS), evaluasi program, pengembangan budaya literasi, hingga strategi pembelajaran yang mendukung kemampuan literasi peserta didik. Meskipun demikian, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan paradigma penelitian. Sebagian besar penelitian masih memandang literasi sebagai aktivitas atau program sekolah yang keberhasilannya diukur melalui keterlaksanaan kegiatan membaca, peningkatan minat baca, atau perubahan perilaku peserta didik. Perspektif tersebut menghasilkan pemahaman yang penting mengenai praktik literasi di sekolah, tetapi belum cukup menjelaskan bagaimana kebijakan literasi diimplementasikan sebagai sebuah proses manajerial yang melibatkan interaksi antara kebijakan, organisasi sekolah, sumber daya, pelaksana, dan mekanisme evaluasi.

Kecenderungan tersebut tampak pada penelitian-penelitian yang membahas implementasi Gerakan Literasi Sekolah. Sebagian besar penelitian menyimpulkan bahwa implementasi GLS telah berjalan dengan baik serta memberikan dampak positif terhadap budaya literasi peserta didik. Namun, apabila dicermati lebih mendalam, ukuran keberhasilan yang digunakan masih didominasi oleh indikator operasional, seperti keterlaksanaan kegiatan membaca lima belas menit, penyediaan pojok baca, peningkatan minat membaca, atau pelaksanaan program literasi secara rutin. Dengan demikian, implementasi kebijakan lebih banyak dipahami sebagai tingkat keterlaksanaan program (program compliance),

bukan sebagai keberhasilan implementasi kebijakan (policy implementation effectiveness). Akibatnya, analisis yang dihasilkan cenderung berhenti pada deskripsi kegiatan tanpa menjelaskan apakah kebijakan tersebut benar-benar telah didukung oleh kesiapan organisasi, kecukupan sumber daya, mekanisme koordinasi, sistem monitoring, serta kapasitas pelaksana dalam mencapai tujuan kebijakan pendidikan.

Di sisi lain, penelitian-penelitian yang mengevaluasi pelaksanaan program literasi memang telah memberikan gambaran mengenai berbagai kendala implementasi, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya minat baca peserta didik, kurang optimalnya pendampingan guru, maupun lemahnya monitoring program. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih memosisikan faktor-faktor tersebut sebagai permasalahan yang berdiri sendiri. Hubungan antarvariabel implementasi belum dianalisis secara komprehensif sehingga belum mampu menjelaskan bagaimana keterbatasan sumber daya memengaruhi proses implementasi, bagaimana proses implementasi memengaruhi hasil program, maupun bagaimana kondisi konteks organisasi menentukan efektivitas kebijakan. Dengan kata lain, penelitian terdahulu telah berhasil mengidentifikasi berbagai persoalan implementasi, tetapi belum mampu menjelaskan keterkaitan sistemik antarunsur implementasi kebijakan. Padahal, dalam perspektif manajemen pendidikan, keberhasilan suatu kebijakan tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh interaksi antara konteks organisasi, input yang tersedia, proses pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Analisis terhadap penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya kecenderungan bahwa budaya literasi diperlakukan sebagai faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan. Berbagai penelitian menegaskan bahwa budaya literasi dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi peserta didik, kompetensi guru, lingkungan belajar, keterlibatan orang tua, maupun ketersediaan fasilitas. Temuan tersebut memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor pendukung literasi, namun pada saat yang sama memperlihatkan bahwa sebagian besar penelitian masih

berorientasi pada identifikasi faktor (factor-oriented research). Pendekatan tersebut menjelaskan apa saja faktor yang memengaruhi implementasi, tetapi belum menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi membentuk keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Akibatnya, rekomendasi yang dihasilkan cenderung bersifat parsial, misalnya menambah fasilitas, meningkatkan motivasi, atau memperkuat peran guru, tanpa memberikan gambaran mengenai strategi pengelolaan implementasi kebijakan secara menyeluruh.

Dari sisi metodologi, penelitian terdahulu didominasi oleh pendekatan kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan program literasi pada satuan pendidikan tertentu. Pendekatan tersebut mampu menghasilkan pemahaman yang kontekstual mengenai praktik implementasi, namun sebagian besar penelitian masih berhenti pada level deskriptif. Penelitian lebih banyak menjelaskan apa yang terjadi selama implementasi daripada menganalisis mengapa implementasi menghasilkan capaian yang berbeda pada setiap konteks sekolah. Sementara itu, penelitian kuantitatif lebih banyak menguji hubungan antarvariabel tanpa menggambarkan dinamika implementasi kebijakan secara utuh. Adapun penelitian systematic literature review berhasil memberikan gambaran mengenai tren penelitian literasi, tetapi belum menyediakan bukti empiris mengenai implementasi kebijakan pada konteks sekolah tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan akan penelitian evaluatif yang mampu mengintegrasikan berbagai dimensi implementasi kebijakan ke dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

Apabila ditinjau dari konteks penelitian, mayoritas penelitian dilakukan pada jenjang sekolah dasar dengan fokus pada Gerakan Literasi Sekolah sebagai program nasional. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan literasi kebahasaan pada jenjang sekolah menengah pertama masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian menempatkan sekolah sebagai lokasi pelaksanaan program, bukan sebagai organisasi yang mengelola implementasi kebijakan.

Konsekuensinya, pembahasan mengenai kapasitas organisasi, tata kelola implementasi, pengambilan keputusan, koordinasi antaraktor, maupun mekanisme evaluasi internal sekolah belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, aspek-aspek tersebut merupakan elemen penting dalam kajian manajemen pendidikan karena menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan sintesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontribusi utama penelitian terdahulu terletak pada kemampuannya menjelaskan praktik implementasi literasi dan mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan program. Namun demikian, terdapat kecenderungan bahwa implementasi masih dipahami sebagai pelaksanaan kegiatan, bukan sebagai proses implementasi kebijakan yang melibatkan hubungan antara konteks, sumber daya, proses, dan hasil. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan konseptual maupun empiris dalam penelitian terdahulu. Secara konseptual, belum banyak penelitian yang mengevaluasi implementasi kebijakan literasi kebahasaan menggunakan kerangka evaluasi yang mampu menghubungkan konteks kebijakan, kesiapan input, kualitas proses implementasi, dan capaian hasil secara terpadu. Secara empiris, penelitian pada jenjang sekolah menengah pertama, khususnya yang mengkaji implementasi kebijakan literasi kebahasaan dalam perspektif manajemen pendidikan, masih sangat terbatas.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini memosisikan implementasi kebijakan literasi kebahasaan bukan sekadar sebagai pelaksanaan program literasi, tetapi sebagai proses implementasi kebijakan yang harus dievaluasi secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model evaluasi Context, Input, Process, Product (CIPP) untuk menganalisis keterkaitan antara kondisi awal kebijakan, kesiapan sumber daya, pelaksanaan implementasi, dan hasil yang dicapai di SMP Negeri 1 Padamara. Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan gambaran mengenai tingkat keterlaksanaan kebijakan, tetapi juga mampu menjelaskan mengapa kebijakan berjalan

efektif atau belum efektif serta memberikan dasar yang lebih kuat bagi pengambilan keputusan dalam penguatan implementasi kebijakan literasi kebahasaan di tingkat satuan pendidikan.



Intelligentia - Dignitas